

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan populasi yang besar dan tergolong sebagai negara berkembang. Setiap tahunnya, pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan. Mengacu pada data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, pada tahun 2024 jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 282.477.584 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai populasi penduduk yang sangat besar yakni melebihi 250 juta jiwa. Negara dengan populasi besar seperti Indonesia, diharapkan memiliki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut belum tercapai dengan baik. Salah satu penyebab dari adanya kondisi tersebut adalah karena malnutrisi, yang salah satunya ditandai dengan stunting serta rendahnya fungsi kognitif. Sehingga, permasalahan stunting menjadi isu prioritas yang harus ditangani (Vita Natalia, 2023).

Stunting adalah kondisi terganggunya pertumbuhan anak akibat kekurangan asupan gizi dalam jangka panjang serta infeksi yang terjadi berulang kali. Keadaan ini ditandai dengan tinggi badan anak yang berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dikenal juga sebagai bentuk kekurangan gizi kronis, stunting muncul ketika pertumbuhan anak tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga tinggi badan mereka tidak sesuai dengan usianya. Masalah stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik, tetapi juga

mempengaruhi perkembangan kognitif, kemampuan belajar, serta produktivitas anak di masa depan. Anak yang mengalami stunting umumnya memiliki kecerdasan yang kurang optimal, lebih mudah sakit, dan berpotensi mengalami penurunan produktivitas saat dewasa. Dalam skala yang lebih luas, stunting dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, memperbesar angka kemiskinan, serta memperdalam kesenjangan sosial. Oleh karena itu, tingginya angka stunting mencerminkan rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya bisa melemahkan daya saing dan produktivitas bangsa di masa mendatang (Adhar Arifuddin et al., 2023).

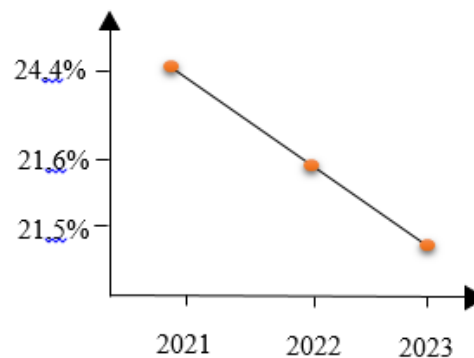
Indonesia menjadi negara dengan prevalensi stunting paling tinggi nomor dua di Asia Tenggara setelah Timor Leste di tahun 2020. Berikut merupakan jumlah prevalensi stunting di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2020.

Table 1.1 Prevalensi Stunting di Kawasan Asia Tenggara tahun 2020

No.	Negara	Prevalensi stunting (%)
1.	Timor Leste	48,8 %
2.	Indonesia	31,8 %
3.	Laos	30,2 %
4.	Kamboja	29,9 %
5.	Filiphina	28,7 %
6.	Myanmar	25,2 %
7.	Vietnam	22,3 %
8.	Malaysia	20,9 %
9.	Brunei Darussalam	12,7 %
10.	Thailand	12,3 %
11.	Singapura	2,8 %

Sumber: Goodstats.id, 2023

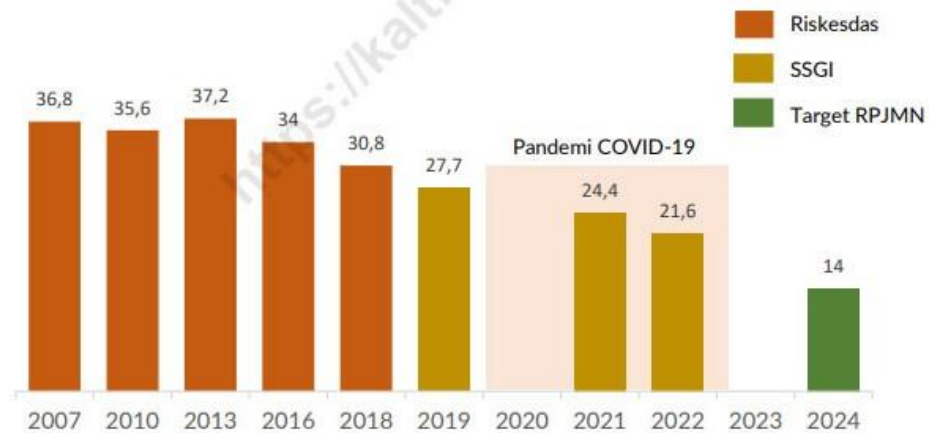
Selanjutnya menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), ditahun 2021 prevalensi stunting di Indonesia juga masih masuk dalam kategori cukup tinggi yaitu sebesar 24,4%. Berikut merupakan perkembangan jumlah prevalensi stunting di Indonesia mulai tahun 2021 hingga tahun 2023.



Gambar 1.1 Prevalensi Stunting di Indonesia dari Tahun 2021-2023

Sumber: Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa angka prevalensi stunting di Indonesia menunjukkan tren penurunan dari tahun 2021 hingga 2023. Namun, persentase tersebut masih tergolong tinggi karena belum mencapai ambang batas yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO), yakni maksimal 20%. Oleh sebab itu, upaya penanggulangan stunting perlu terus ditingkatkan guna mencapai target penurunan pada tahun 2024. Di bawah ini disajikan gambar yang menggambarkan perkembangan prevalensi stunting di Indonesia dari tahun ke tahun, termasuk target penurunan prevalensi pada 2024.



Gambar 1.2 Perkembangan Prevalensi Balita Stunting Indonesia

Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024

Data diatas menjelaskan bahwa prevalansi balita stunting di Indonesia dari tahun ke tahun telah mengalami kenaikan maupun penurunan yang dinamis. Kenaikan terjadi pada tahun 2013 dimana prevalansi stunting mencapai hingga diangka 37,2%. Kemudian sejak pada tahun 2016 mulai terjadinya penurunan angka prevalensi stunting di Indonesia yang cukup signifikan yaitu menjadi 34%. Hingga pada akhirnya ditahun 2022 angka prevalensi stunting berhasil diturunkan menjadi 21,6%. Penurunan prevalensi stunting tidak hanya sampai disitu, karena berdasarkan data terbaru dari Kementerian Kesehatan, angka stunting di Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar 21,5% dan ini berarti dari tahun 2022 ke 2023 prevelansi stunting di Indonesia turun sebanyak 0,1%. Dari diagram diatas juga diketahui bahwa pada tahun 2024, target prevalensi stunting di Indonesia menjadi 14%. Untuk mencapai target RPJMN tersebut, maka diperlukannya dukungan oleh seluruh pihak, agar pemerintah bersama-sama mampu mencapai target yang telah ditentukan.

Stunting bisa mulai terjadi sejak masa kehamilan, bahkan sebelum bayi dilahirkan. Hal ini tercermin dari data SSGI 2022 yang menunjukkan bahwa 18,5% bayi lahir dengan panjang badan kurang dari 48 cm. Temuan ini menyoroti pentingnya pemenuhan gizi yang optimal bagi ibu hamil. Selain itu, survei tersebut juga mengungkap fakta yang mengkhawatirkan, yaitu adanya peningkatan risiko stunting sebesar 1,6 kali lipat pada anak usia 12–23 bulan dibandingkan dengan anak usia 6–11 bulan (dari 13,7% menjadi 22,4%). Kondisi ini mencerminkan tantangan dalam pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) sejak usia 6 bulan, baik dari segi kesesuaian usia, frekuensi, porsi, tekstur, maupun keragaman jenis makanan. Pada tahap ini, pemenuhan kebutuhan energi dan protein sangat penting untuk mencegah terjadinya stunting (Kemenkes, 2024).

Untuk mengatasi permasalahan stunting di Indonesia, pemerintah telah menetapkan dasar hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Regulasi ini menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting sangat penting dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Dalam Bab II Pasal 2 disebutkan bahwa pelaksanaan percepatan penurunan stunting memerlukan penetapan Strategi Nasional yang terdiri dari lima pilar utama. Strategi ini mencakup berbagai upaya yang menyangkut anak di bawah usia lima tahun, sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Kelima pilar tersebut meliputi:

- a. Penguatan komitmen dan kepemimpinan di berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari kementerian/lembaga hingga pemerintah desa;

- b. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Sinergi antara intervensi spesifik dan sensitif di semua tingkatan pemerintahan;
- d. Penguatan ketahanan pangan dan gizi di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat;
- e. Pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi yang mendukung upaya penurunan stunting.

Strategi tersebut dirancang dengan tujuan untuk mengatasi masalah stunting secara menyeluruh, termasuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, memastikan kecukupan gizi, memperbaiki pola pengasuhan anak, serta memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Selain itu, strategi ini juga bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan air minum yang layak dan fasilitas sanitasi. Dalam pelaksanaannya, percepatan penurunan stunting menasar sejumlah kelompok prioritas, yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak usia 0 hingga 59 bulan. Kegiatan yang dilaksanakan menyesuaikan dengan kelompok sasaran tersebut, sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk tahun 2024, yaitu:

- a. Remaja: Pemberian TTD (Tablet Tambah Darah) yang dikonsumsi guna mencegah terjadinya anemia, serta pemberian sosialisasi tentang pergaulan dan menghindari adanya fenomena hamil diluar nikah sehingga mencegah adanya kehamilan yang tidak diinginkan.
- b. Calon pengantin: Melakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon Pasangan Usia Subur (PUS) sebagai bagian dari pelayanan nikah, serta memberikan sosialisasi terkait pemahaman yang baik tentang stunting.

- c. Ibu hamil: Pemberian TTD (Tablet Tambah Darah) untuk ibu hamil dengan jumlah 90 tablet atau lebih sepanjang masa kehamilan, serta memberikan tambahan gizi bagi ibu hamil yang mengalami KEK (Kurang Energi Kronik).
- d. Ibu menyusui: Memberikan layanan Keluarga Berencana (KB) setelah menjalani persalinan, serta memberikan pemahaman atau sosialisasi mengenai pentingnya memberikan ASI eksklusif, pemberian MP-ASI sesuai waktunya, dan tidak lupa pentingnya memberikan anak imunisasi dasar yang lengkap.
- e. Anak berusia 0 – 59 bulan: Memastikan bayi berusia kurang dari 6 bulan agar mendapat Air Susu Ibu eksklusif, memastikan anak dengan usia 6-23 bulan mendapatkan MP-ASI (Makanan Pendamping Asi Susu Ibu), melakukan pemantauan bagi anak usia dibawah lima tahun (balita) terkait pertumbuhan dan perkembangannya, memastikan balita yang mengalami gizi kurang agar memperoleh asupan gizi tambaha, serta memastikan balita menerima imunisasi dasar secara lengkap.

Meskipun telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting serta berbagai program Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, hal tersebut belum cukup untuk mengentaskan permasalahan stunting di Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya permasalahan dalam penanganan stunting di Indonesia. Permasalahan penanganan stunting tersebut terkait dengan penggunaan dana Rp10 miliar yang seharusnya

diorientasikan untuk penurunan angka stunting namun penggunaannya tidak tepat sasaran dan tidak efisien. Dana tersebut tidak digunakan secara keseluruhan untuk membeli makanan tambahan (PMT) bagi anak-anak, melainkan untuk kepentingan lain yang tidak relevan seperti untuk rapat, perjalanan dinas, dan studi banding. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta. Beliau mengkritisi penggunaan dana penanggulangan stunting yang dinilai tidak tepat sasaran. Dari total anggaran sebesar Rp10 miliar, sekitar Rp6 miliar digunakan untuk kegiatan rapat dan perjalanan dinas, sementara Rp2 miliar dialokasikan untuk pembangunan yang tidak terlalu penting. Hanya Rp2 miliar yang benar-benar digunakan untuk pengadaan makanan bergizi seperti susu, daging, telur, dan sayuran. Presiden menegaskan bahwa jika pengelolaan anggaran terus dilakukan dengan cara seperti ini, maka persoalan stunting di Indonesia tidak akan pernah terselesaikan. Ia pun mengimbau agar penggunaan dana difokuskan pada hasil nyata, bukan sekadar prosedur, sehingga pengeluaran menjadi lebih tepat guna dan berdampak langsung (CNN Indonesia, 2023).

Permasalahan tersebut perlu menjadi perhatian dan harus segera dibenahi, sebab target prevalensi stunting yang harus dicapai oleh Indonesia adalah sebesar 14% di tahun 2024. Target tersebut ditetapkan untuk mewujudkan adanya tujuan pembangunan yang berkelanjutan ditahun 2030 nantinya (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, 2021). Apabila masalah penggunaan dana yang tidak tepat sasaran dan tidak efisien ini

masih terjadi, maka penurunan angka stunting sesuai target tidak akan pernah tercapai. Oleh karena itu, diharuskan untuk seluruh unsur pemerintah mulai dari tingkat nasional hingga tingkat lokal di Indonesia, untuk berkomitmen dan turut melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka percepatan penurunan stunting agar hasil yang didapatkan dapat mencapai target yang telah direncanakan, termasuk pada pemerintah provinsi Jawa Timur.

Provinsi Jawa Timur termasuk salah satu daerah dengan penurunan angka stunting terbanyak di Indonesia. Mengutip informasi dari ([sehatnegeriku.kemkes](https://sehatnegeriku.kemkes.go.id), 2023), provinsi yang mencatat penurunan prevalensi stunting tertinggi pada tahun 2023 adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Jawa Timur pada tahun 2023 tercatat sebesar 17,7% yang berada di bawah rata-rata nasional sebesar 21,5%. Sementara itu, menurut pernyataan Penjabat (PJ) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono dalam kutipan (Purmadani, 2024), angka stunting di Jawa Timur terus mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, prevalensinya berada di angka 23,5%, kemudian turun menjadi 19,2% pada 2022, dan kembali menurun menjadi 17,7% pada 2023.

Meskipun prevalensi stunting di Jawa Timur sudah mencapai 17,7 %, namun angka tersebut juga masih berada diatas target nasional prevalensi stunting Indonesia yaitu sebesar 14%. Dengan demikian, seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur diharapkan dapat bersungguh-sungguh dalam menurunkan prevalensi stunting dimasing-masing daerah, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi

prevalensi stunting di provinsi Jawa Timur. Terutama pada pemerintah daerah Kabupaten Tuban.

Tuban adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Tuban juga mengalami masalah stunting yang dapat mengancam pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada tahun 2022, jumlah prevalensi stunting di Kabupaten Tuban menempati urutan ke 8 dari 32 Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Annur, 2023). Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tuban masuk dalam 10 besar Kabupaten/Kota dengan prevalensi stunting paling tinggi di Jawa Timur tahun 2022. Berdasarkan data temuan peneliti, Ibu Chandra Dewi Kumalasari dari bidang PPKB Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, menjelaskan bahwa,

“Permasalahan stunting di Kabupaten Tuban dapat terjadi karena faktor multisektor, yaitu mulai dari pola asuhnya, lalu asupan gizinya, pola makannya, kemudian ada faktor dari ekonomi keluarga, karena penyebab stunting tidak dapat dilihat hanya dari satu pihak saja. Selain itu penyebab yang lain ada dari pernikahan dini. Pernikahan dini terjadi karena pola pikir orangtua yang masih tertinggal ibaratnya daripada mengejar sekolah mending dinikahkan saja, nah pernikahan dini juga terjadi karena kurangnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi. Lalu penyebab yang lain juga karena adanya penyakit infeksi atau penyakit penyerta yang terjadi pada anak.” (olahan penulis, 2024).

Berikut ini merupakan data presentase balita stunting di Kabupaten Tuban, berdasarkan bulan timbang Agustus pada setiap Puskesmas di tahun 2020 hingga 2024.

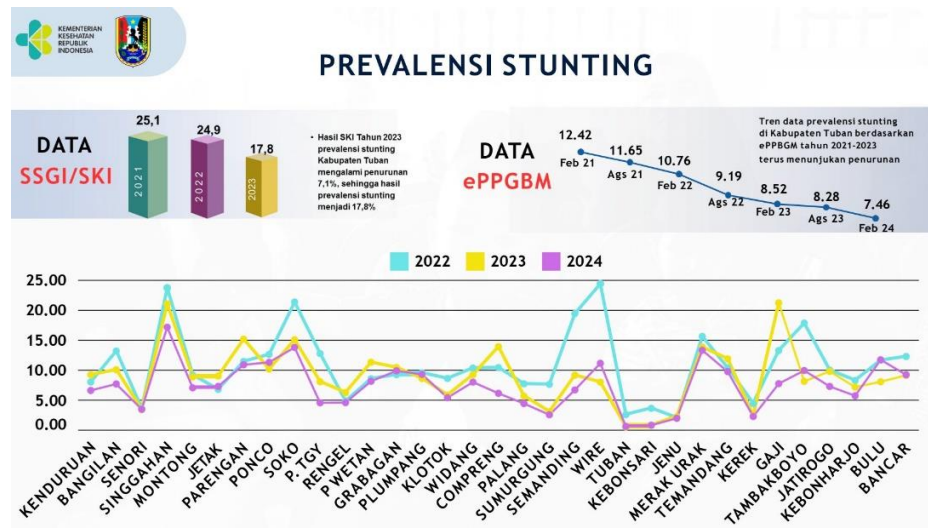
Tabel 1. 2 Rekap Presentase Balita Stunting Kabupaten Tuban Per Puskesmas Tahun 2020-2024

No.	Puskesmas	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Kenduruan	26.89	22.16	9.20	7.57	7.68
2	Bangilan	8.83	9.79	12.69	10.34	7.82
3	Senori	16.07	3.21	3.65	3.20	3.26
4	Singgahan	28.42	28.95	25.53	19.13	16.99
5	Montong	8.76	8.23	10.02	7.55	7.03
6	Jetak	7.07	3.77	7.58	7.85	7.09
7	Parengan	13.42	16.52	14.09	13.49	11.74
8	Ponco	15.96	14.15	12.09	9.96	14.71
9	Soko	22.13	24.35	17.27	14.54	13.36
10	Prambon Tergayang	12.33	12.15	10.68	5.93	2.94
11	Rengel	6.40	3.45	3.44	4.75	4.85
12	Prambon Wetan	8.65	7.22	12.00	9.56	8.98
13	Grabagan	11.51	8.19	4.82	10.48	18.59
14	Plumpang	8.30	7.21	8.39	8.69	9.94
15	Klotok	12.34	13.02	7.83	5.93	5.66
16	Widang	20.66	8.65	11.06	9.93	9.27
17	Comprengr	11.58	8.62	12.56	16.07	9.85
18	Palang	12.72	11.32	6.49	5.74	4.81
19	Sumurgung	7.60	5.46	3.30	3.23	3.06
20	Semanding	17.11	16.75	7.93	9.53	7.07
21	Wire	6.95	19.52	7.84	8.56	8.73
22	Tuban	6.61	3.60	1.00	0.23	0.74
23	Kebonsari	5.11	3.36	1.47	1.39	1.59
24	Jenu	2.74	2.06	2.79	3.07	2.08

25	Merakurak	19.24	14.38	15.07	13.68	11.64
26	Temandang	7.54	7.30	7.66	11.51	10.93
27	Kerek	9.34	6.30	2.96	2.52	14.95
28	Gaji	12.52	4.95	24.75	13.32	5.88
29	Tambakboyoy	18.69	25.55	13.48	10.45	14.75
30	Jatirogo	11.14	11.04	10.46	8.60	7.13
31	Kebonharjo	32.09	16.16	7.55	6.83	10.22
32	Bulu	15.31	19.06	11.61	9.91	14.69
33	Bancar	13.41	13.81	8.31	9.90	7.58
KABUPATEN TUBAN		12.54	11.65	9.19	8.28	8.42

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, 2024

Dari data yang tertera pada tabel diatas, menjelaskan bahwa mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2024 jumlah presentase balita stunting di Kabupaten Tuban berdasarkan bulan timbang Agustus mengalami penurunan di setiap tahunnya. Di tahun 2020 jumlah presentasinya sebesar 12,54%, lalu pada tahun 2021 turun menjadi 11,65%, kemudian di tahun 2022 turun lagi menjadi 9,19%, hingga pada tahun 2023 presentase balita stunting berdasarkan bulan timbang menjadi 8,28%. Meskipun pada tahun 2024 presentasi naik menjadi 8,42%, hal ini menunjukkan terjadi kenaikan dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar 0,14%. Selain data pada tabel diatas, berikut penulis tampilkan berupa grafik persebaran prevalensi stunting yang ada di Kabupaten Tuban.



Gambar 1.3 Grafik Persebaran Prevalensi Stunting di Kabupaten Tuban

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, 2024

Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 yang dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kabupaten Tuban berhasil menurunkan prevalensi stunting sebesar 7,1%. Selama tiga tahun terakhir, angka stunting di wilayah ini terus mengalami penurunan. Pada tahun 2021, prevalensi stunting tercatat sebesar 25,1%, lalu menurun menjadi 24,9% pada tahun 2022, dan kembali menunjukkan penurunan pada tahun 2023 (Tubankab, 2024a). Merujuk pada data diatas, meskipun angka stunting menunjukkan penurunan, masalah ini tetap tidak boleh dianggap sepele karena dampak negatif yang ditimbulkan akibat stunting cukup besar. Anak-anak merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kelak akan menjadi indikator kesuksesan dari suatu daerah. Apabila masalah stunting tidak diselesaikan, hal ini dapat berdampak pada kualitas SDM yang kurang optimal, yang akan memengaruhi pembangunan daerah. Oleh karena itu, upaya percepatan penurunan

stunting tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam suatu daerah, termasuk di Kabupaten Tuban.

Pemerintah Kabupaten Tuban telah aktif melakukan berbagai upaya untuk mempercepat penurunan stunting. Salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Tuban dalam mendukung penurunan angka stunting adalah dengan mengeluarkan payung hukum berupa Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanggulangan Stunting. Peraturan ini kemudian diperkuat dan lebih di perinci dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Tuban untuk periode 2022-2024. Dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022, dijelaskan bahwa untuk mencapai sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif guna mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, percepatan penurunan stunting harus dilakukan secara terintegrasi di Kabupaten Tuban dengan melibatkan berbagai instansi pemerintah dan pihak terkait (Perbup Kabupaten Tuban Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Tuban Tahun 2022-2024).

Selain membuat payung hukum yang jelas tentang penanggulangan dan pencegahan stunting, adapun beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Tuban. Berikut merupakan program dan kegiatan nyata yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Tuban guna untuk menurunkan prevalensi stunting menurut penjelasan dari Ibu Chandramanda selaku Analis Gizi bidang KESFARNAKES (Kesehatan

Masyarakat Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta Tenaga Kesehatan) beliau menjelaskan bahwa,

“Adanya gerakan BESTI TANIA (Sehat Berprestasi Tanpa Anemia), gerakan ini diciptakan oleh Dinkes Kabupaten Tuban dan kegiatannya adalah pemeriksaan kesehatan berkala sekarang sebutannya skrining kesehatan, hal ini biasanya dilakukan untuk remaja kelas satu SMP/MTS dan kelas satu SMA/SMK/MA yang baru masuk, kegiatannya berupa cek hb, lalu ada pemeriksaan kesehatan jiwa juga ada. Kemudian untuk seluruh remaja putri ini diberi tablet tambah darah satu minggu sekali. Bagi remaja putri yang mengalami anemia, akan diberikan konseling oleh pihak puskesmas. Upaya yang selanjutnya adalah adanya bantuan sosial misalnya berupa paket sembako bergizi yang ditujukan untuk keluarga beresiko stunting. Kemudian adanya jambanisasi untuk keluarga beresiko stunting. Ada juga program rumah tinggal layak huni untuk keluarga tidak mampu. Program ini juga sudah terealisasi di setiap kecamatan. Berikutnya adalah penyediaan air bersih bagi keluarga dan penyediaan air layak minum. Selain itu ada juga pendampingan terhadap calon pengantin yang dilakukan oleh TPK (Tim Penggerak Keluarga), kegiatannya berupa memberikan edukasi sebelum pernikahan dan juga mendampingi saat pelayanan kesehatan. Kemudian bagi ibu hamil kegiatannya ada kelas ibu hamil, pemberian tablet tambah darah, pemberian makanan tambahan, serta pemberian jaminan kesehatan bagi ibu hamil. Dan yang terakhir adanya program kegiatan seperti bina keluarga balita, sekolah orang tua hebat, terus ada pik-r, dan juga program genre.” (olahan penulis, 2024).

Selain upaya-upaya berupa kegiatan dan program yang telah disebutkan diatas, angka stunting yang berhasil turun dalam tiga tahun terakhir di Kabupaten Tuban merupakan hasil dari kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat. Hal tersebut dipertegas oleh pernyataan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Tuban Esti Surahmi, sebagai berikut:

“Bahwa pencapaian tersebut (penurunan angka stunting) berhasil diraih berkat komitmen kuat dari Pemerintah Kabupaten Tuban di bawah kepemimpinan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, SE, serta kolaborasi dan kerja sama dari seluruh pihak Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Tuban. Upaya percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara kolaboratif dengan menggandeng semua elemen di masyarakat. Sejumlah OPD dan Tim

Meskipun begitu, proses kolaborasi yang dilaksanakan masih terdapat masalah yang menjadi hambatan dalam proses kolaborasi penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Tuban. Dikutip dari (Tubankab, 2024) masalah yang masih terjadi dalam kolaborasi menurunkan angka stunting di Kabupaten Tuban adalah kurangnya keterlibatan dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam penanganan stunting. Masyarakat perlu dilibatkan dalam setiap program pemerintah untuk meningkatkan pemahaman dan pencerdasan masyarakat. Karena masyarakat yang memahami pentingnya pencegahan stunting, akan lebih bersedia untuk berpartisipasi dalam program-program yang bertujuan menurunkan prevalensi stunting.

Penelitian ini menjelaskan tentang tata kelola kolaboratif yang dilakukan untuk mempercepat penurunan stunting, khususnya di Kabupaten Tuban. Pada prinsipnya, penanganan stunting tidak bisa diserahkan kepada pemerintah saja. Pemerintah daerah memerlukan keterlibatan berbagai pihak untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk mengadopsi model *Collaborative Governance* dalam pelaksanaannya. Mengatasi permasalahan stunting tentu memerlukan koordinasi antar stakeholder dan keterlibatan dari berbagai pemangku kepentingan. Upaya penghapusan stunting harus dilakukan secara terkoordinasi, yaitu melalui aksi bersama yang terintegrasi dan saling mendukung antara pembangunan infrastruktur kesehatan dan program pemberdayaan kesehatan, serta memberikan pemahaman bagi masyarakat (Nisa, 2018). Dengan demikian, tata kelola kolaboratif dalam penanganan stunting

dianggap menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan percepatan penurunan stunting.

Berdasarkan data-data diatas, peneliti memilih topik ini karena belum ada penelitian yang membahas sebelumnya, itu sebabnya peneliti memilih proses tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) sebagai fokus dalam penelitian yang akan dilakukan. Peneliti memilih lokasi di Kabupaten Tuban karena berdasarkan data Kabupaten Tuban berhasil dan konsisten dalam menurunkan prevalensi stunting dengan jumlah yang signifikan di tiga tahun terakhir. Akan tetapi, berdasarkan hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, prevalensi stunting di Kabupaten Tuban sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan prevalensi stunting Provinsi Jawa Timur. Hal ini dikarenakan masih terdapat masalah dalam kolaborasi yang dilakukan, yaitu kurangnya keterlibatan dari masyarakat sehingga menjadi penghambat dalam menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Tuban sesuai dengan target nasional. Sehingga, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“*Collaborative Governance* Dalam Perencanaan Untuk Menurunkan Prevalensi Stunting di Kabupaten Tuban”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana penerapan Collaborative Governance berperan dalam menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Tuban?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan serta menganalisis penerapan Collaborative Governance dalam upaya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Tuban.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif di bidang pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi dalam memperluas pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa maupun masyarakat mengenai penerapan Collaborative Governance dalam upaya menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Tuban.
- b. Menjadi salah satu bentuk pemenuhan persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.4.2 Manfaat Praktis

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan dapat mendukung kegiatan pendidikan, khususnya dalam bidang Administrasi Publik, serta menjadi referensi bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat terkait topik *Collaborative Governance* Dalam Menurunkan Prevalensi Stunting di Kabupaten Tuban.

3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan mahasiswa mengenai proses *collaborative governance*, serta membantu mahasiswa memahami pentingnya penurunan angka stunting dalam mengatasi masalah publik melalui penelitian ini.